

SKRIPSI

**PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN ENREKANG**



Oleh:

XZY MEY YUNI

Nomor Induk Mahasiswa: 1056111017 16

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

**PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

XZY MEY YUNI

Nomor Stambuk: 10561 11017 16

Kepada

20/03/2021

1 bop
Smb. Alumni

R/0052/ADN/21 co
YUN

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Di
Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Xzy Mey Yuni
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11017 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhlis Madani, M. Si

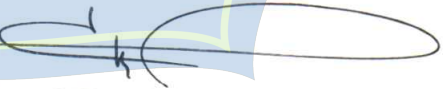

Nurbiah Tahir, Sos., M. AP

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 0158/FSP/A.4-11/11/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 25 bulan Februari tahun 2021

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si ()
3. Nurbiah Tahir S.Sos., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Xzy Mey Yuni

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11017 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Xzy Mey Yuni

ABSTRAK

Xzy Mey Yuni, Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir. Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Enrekang. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenolog. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang sudah cukup maksimal. Perencanaan sudah dapat dikatakan sesuai dengan sistematika fungsi manajemen mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pengorganisasian yang sudah cukup baik mulai dari pembagian tugas sesuai dengan bidangnya serta pengelompokkan, Kepemimpinan yang sudah cukup tegas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pengendalian sudah cukup baik dalam mengawasi bawahan serta mengatasi pelanggaran dalam pemungutan retribusi.

Kata Kunci: Pengelolaan Retribusi, Pariwisata

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Allah yang paling agung untuk membuka jalan bagi setiap maksud kita, Allah yang paling suci untuk menjadi energi bagi petunjuk hidup dan kesuksesan kita. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan bimbingan dari-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Enrekang”** dapat diselesaikan.

Setiap orang dalam berkarya selalu mengharapkan kesempurnaan, termasuk dalam tulisan ini. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberi gambaran dan informasi sejauh mana pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Agus Sardado dan Rismawaty yang telah berdoa, berjuang, rela berkorban tanpa pamrih dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Ihvani Malik, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Enrekang
3. Nasrul Haq, S.Sos. MPA, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Nurbiah Tahir, S. Sos, M.AP, Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Budisetiawati, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Dr. Muhlis Madani, M. Si, sebagai Pembimbing I dan Nurbiah Tahir, S. Sos, M.AP, sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah ikhlas mentransfer ilmunya kepada penulis.
8. Dadang Sumarna S.Pd., M.Pd, selaku Kepala Dinas pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
9. Seluruh pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2016 terkhusus Kelas A Universitas Muhammadiyah Makassar, terima kasih atas solidaritas yang diberikan selama menjalani perkuliahan, semoga keakraban dan kebersamaan kita tidak berakhir sampai disini.

11. Terimakasih juga kepada Sist & Brother yaitu Dewi, Ika, Jihan, Dinda, Sulas, Ani, Molana, Zaenal, Ib, Alam, Fadhil, dan Aswan karena selalu ada baik dalam keadaan susah ataupun senang selama 4 tahun ini, semoga pertemanannya abadi.

12. Saudara-saudaraku yang setia dan tulus mengorbankan waktu, tenaga, materi, doa, dukungan dan masukan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini serta seluruh keluarga besar.

13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 25 Februari 2021



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Definisi, Konsep, dan Teori.....	8
C. Kerangka Pikir	25
D. Fokus Penelitian.....	27
E. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30

C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	63
C. Pembahasan.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	91
RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 26

Gambar 2 Kuitansi Tanda Pembayaran Retribusi..... 90

Gambar 3 Tiket Masuk Anak-Anak Permandian Alam Lewaja..... 90

Gambar 4 Tiket Masuk Dewasa Permandian Alam Lewaja..... 91



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Peneliti	31
Tabel 4.1	Objek Wisata di Kabupaten Enrekang.....	60
Tabel 4.2	Jumlah Retribusi Villa Bambapuang dan Permandian Alam Lewaja	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memerlukan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber dana dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pemerintah daerah bekerja keras dalam memperkuat perekonomian daerah, salah satunya meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yaitu seluruh penerimaan daerah yang berasal dari retribusi, pajak, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Salah satu bentuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara mengelola potensi pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu PAD sebaiknya ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendapatan dari penerimaan retribusi salah satunya adalah retribusi yang berasal dari sektor pariwisata.

Penerimaan retribusi daerah sektor pariwisata diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi sektor pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, BAB II, Bagian ke IV mengenai

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Pasal 8.

Retribusi merupakan pungutan oleh daerah sebagai bentuk pembayaran pemberian izin dan layanan jasa tertentu yang telah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan masyarakat, atau badan menurut Undang – Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi. Retribusi adalah pembayaran wajib oleh penduduk untuk negara dengan adanya jasa tertentu yang telah diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Marihot, 2016:7-8). Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang No. 34 tahun 2000 dan menurut (Marihot, 2016:7-8) diketahui bahwa retribusi adalah pembayaran yang wajib bagi penduduk yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu badan.

Pengelolaan merupakan suatu proses yang melibatkan dan pengarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi dengan maksud yang benar menurut Ali Baba (2016:4). Pengelolaan tidak hanya melakukan kegiatan, akan tetapi juga merupakan juga beberapa rangkaian kerja yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar pencapaian suatu tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan lain –lain.

Pariwisata merupakan sektor yang berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Selain

sebagai sumber penghasil devisa yang cukup baik, pariwisata juga dianggap dapat mendorong kegiatan investasi. Untuk dapat mengembangkan suatu pariwisata pemerintah berupaya melakukan perbaikan, mengadakan berbagai fasilitas, serta melakukan kegiatan promosi agar lebih menarik minat wisatawan.

Kontribusi retribusi dari sektor Pariwisata Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan dapat terus meningkat, sehingga semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah maka akan menunjukkan kualitas Otonomi suatu Daerah tersebut akan terus meningkat. Penerimaan retribusi sektor pariwisata harus didukung pengaruh yang positif terhadap efektifitas penerimaan pendapatan di bidang atau sektor pariwisata.

Banyaknya obyek wisata menjadikan Kabupaten Enrekang memiliki potensi di sektor wisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Enrekang. Sektor pariwisata pada pengembangan sumber daya alam Kabupaten Enrekang Sulawesi – Selatan, pada tahun 2020 mendatang, diharapkan lebih konstruktif bagi sumber pendapatan asli daerah. Rencana pembangunan sektor pariwisata saat ini bertumpu pada pengelola sumberdaya alam, seperti permandian alam Lewaja, panorama Gunung Latimojong, resting house Bambapuang (Anggeraja) dan kebun raya Enrekang (Maiwa) (infopublik.id, 23 September 2019)

Potensi wisata di Kabupaten Enrekang sangat tinggi, tidak heran jika Enrekang jadi salah satu destinasi favorit di Sulawesi Selatan. Pada tahun

2019 wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Enrekang berjumlah 32.570 orang. Tidak hanya wisatawan lokal keindahan Enrekang juga disoroti mancanegaradari jumlah kunjungan wisatawan mancanegaradi Kabupaten Enrekang sebanyak 506 orang.

Dalam hal ini penerimaan retribusi sektor pariwisata cukup potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Enrekang karena mengingat jumlah wisata yang ada di Kabupaten Enrekang begitu banyak yang dapat dikelola. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pendapatan agar setiap lokasi wisata yang ada dipelosok desa dapat memahami potensi pendapatan mereka dan juga dapat memaksimal Pendapatan Asli Daerah. Masalahnya 2 tahun terakhir (2018 – 2019) yaitu Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Enrekang dalam sektor retribusi tidak mencapai target. Memasuki triwulan pertama Tahun 2018 gagal memenuhi target yang seharusnya pada triwulan pertama Pemerintah Kabupaten Enrekang menargetkan dapat memperoleh 25% atau 12,7M. Pada tahun 2019 memasuki triwulan pertama Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali gagal memenuhi target hingga bulan april realisasi yang diperoleh baru mencapai 12,7M atau sekitar 11,6% dari target yang ditentukan. Adanya retribusi daerah yang dihilangkan mengakibatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang yang mempengaruhi pengurangan pencapaian target. Contoh retribusi yang dihilangkan yaitu retribusi pengadaan biaya. Berkaitan dengan pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupate Enrekang, menurut James A. F. Stoner ada beberapa indikator yang perlu di perhatikan yakni :

1. Perencanaan (*Planning*), perencanaan adalah bentuk proses dalam menentukan hal-hal atau tujuan yang ingin dicapai dimasa mendatang, serta penentuan berbagai tahapan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), pengorganisasian adalah bentuk proses mengatur tugas tanggungjawab dan wewenang bagi setiap individu dalam manajemen menjadi kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Kepemimpinan (*Leading*), kepemimpinan adalah kemampuan seorang dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan suatu tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses dalam mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.
4. Pengendalian (*Controlling*), pengendalian adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Retribusi dari sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Enrekang, sehingga dapat membantu meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN ENREKANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis atau pihak – pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai retribusi sektor pariwisata.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan penjelasan bagaimana pengelolaan retribusi sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Irmawati dkk (2019) “Pengelolaan RetribusiTempat Rekreasi Taman Purbakala Batu Pake Gojeng Dikabupaten Sinjai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi di Taman Purbakala Batu Pake Gojeng sudah cukup maksimal dapat dilihat dari realisasi target jumlah retribusi dari tahun 2012 sampai tahun 2016 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengaruh yang ditimbulkan Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Purbakala Batu Pake Gojeng di Kabupaten Sinjai yaitu dapat meningkatkan daya tarik pengunjung dan meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten sinjai.
2. Nor Hidayat dan A'raf Musthafa Rusnain (2016) “Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Katingan”. Hasil penelitian Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Katingan diharapkan dapat menggunakan sebagai acuan dalam mengatasi kendala yang ada sehingga PAD yang bersumber dari retribusi daerah dapat meningkat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, karena menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang – undangan dan juga terdapat keterkaitan dengan variabel – variabel sosiologis, yaitu mengenai bahwa: Hasil penelitian dapat

ditunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten No. 6 Tahun 2009 bahwa secara umum telah sesuai dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Ariska (2017) “Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul”. Hasil yang penulis dapat dari penelitian ini adalah bentuk pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul. Meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul sudah cukup optimal, dengan kontribusi retribusi pantai parangtritis terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

B. Definisi, Konsep, dan Teori

1. Teori Manajemen Publik

Manajemen publik atau biasa juga disebut manajemen pemerintahan merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Lynn dalam Iskandar (2001:195) mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari proses dan dari hasilnya. Manajemen pemerintahan harus mengutamakan proses demokratis diatas segala rencana dan tujuan yang telah ditentukan, sedangkan sebagai hasil dari manajemen pemerintahan akan menghasilkan dan menggambarkan kesungguhan hati, pemakaian secara efisien akan

sumber – sumber yang terbatas dengan mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada menurut Ramto dalam Iskandar (2001:195).

Menurut Van Vollenhoven (dalam Sahya Anggara 2012:548) manajemen pemerintahan dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Bestuur* (pemerintahan), yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
- b. *Politie* ialah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam pemerintahan;
- c. *Rechtsspraak* atau peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam pemerintahan;
- d. *Regeling* atau pengaturan perundang – undangan, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan – peraturan umum dalam pemerintahan.

James A. F Stoner (2003:4) Dalam bukunya yang berjudul Manajemen dari Jilid II terbitan bahasa Indonesia Stoner mengklasifikasikan fungsi – fungsi manajemen itu sebagai : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*).

2. Konsep Pengelolaan

a. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Pengelolaan juga merupakan proses melakukan

kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Jadi manajemen itu merupakan bentuk proses dalam mewujudkan tujuan atau keinginan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, baik organisasi sosial, organisasi bisnis, organisasi pemerintah, dan sebagainya. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen yaitu pengorganisasian, pergerakan manusia, pengarahan untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk suatu tujuan. Dimana manajemen adalah unsur yang bertugas mengendalikan semua sumber daya organisasi yang dapat dimanfaatkan sebagai proses pencapaian tujuan.

Marry Parker Follet (dalam Mustafa dan Elwan 2018:18) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Manajemen dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan melalui orang lain, manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita 2011:21) pengelolaan sama halnya dengan manajemen yaitu mengorganisasikan, mengerjakan dan mengarahkan manusia agar memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) menerangkan bahwa pengelolaan tidak hanya melaksanakan kegiatan namun merupakan dari rangkaian kegiatan

yang meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sondang (dalam Usman Effendi 2015:4) menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Defenisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki.

Hasibuan (dalam Usman Effendi 2015:4) memberikan pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Robbins (dalam Usman Effendi 2015:4) mendefenisikan manajemen adalah suatu proses melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja agar disesuaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah ilmu manajemen yang dilakukan untuk menangani sesuatu atau mengurus sesuatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

b. Fungsi Pengelolaan

Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu “suatu proses yang membedakan atas perencanaan , pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan

dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Fungsi manajemen menurut G. R. Terry (dalam Ali Baba 2016:32) yaitu :

- 1) Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah – langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan memperhitungkan matang – matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- 2) Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang – orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- 3) Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing – masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- 4) Pengawasan (*controlling*) dilakukan untuk mengawasi gerakan dari organisasi, apakah sesuai dengan rencana atau belum. Serta memberikan pengawasan penggunaan sumber daya, apakah digunakan secara efektif dan efisien, ataukah justru melenceng dari rencana.

c. Unsur – Unsur Pengelolaan

Adapun unsur pengelolaan juga sama seperti unsur manajemen.

Ali baba (2016:10) menyebutkan manajemen memiliki unsur – unsur yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan yaitu 6M meliputi :

- 1) *Men* (Manusia), Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif,
- 2) *Money* (Uang), uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) *Methods* (Metode), cara – cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan,
- 4) *Materials* (Bahan Baku), bahan – bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan,
- 5) *Machines* (Mesin), mesin – mesin atau alat – alat diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan,
- 6) *Markets* (Pasar), pasar untuk menjual *output* dan jasa – jasa yang dihasilkan.

d. Prinsip – Prinsip Pengelolaan

Arsyad (2002:22) menerangkan beberapa prinsip pengelolaan di antaranya sebagaimana di bawah ini :

- 1) Pembagian kerja

Dengan adanya kejelasan dalam pembagian kerja, maka akan menghasilkan daya guna dan berhasil dalam pekerjaan tersebut berkat cara kerjanya yang baik.

2) Disiplin

Mematuhi aturan yang telah disepakati, dan anggota memiliki kesadaran tinggi tentang tugas-tugas dan tanggungjawab karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan manajemen.

3) Kesatuan pemerintah (*Unity of Command*)

Perlu adanya kesatuan pemerintah untuk menghindari kesimpangsiuran.

4) Kesatuan arah

Kesepakatan tentang arah tujuan merupakan hal yang mengikat kelompok dan mencegah perselisihan.

5) Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

Kepentingan tiap anggota diperlukan, tetapi kepentingan bersama diutamakan.

6) Rantai berjenjang dan rentang kendali

Manajemen dilakukan dengan cara bertingkat – tingkat dan merupakan mata rantai yang berjenjang. Untuk menghasilkan efektifitas yang tinggi maka, rentang kendali manajemen sebaiknya dibatasi pada tingkat dibawahnya.

3. Konsep Retribusi

Menurut Rochmad Sumitro (dalam Josef Riwu Kaho 2006:170)

Retribusi secara umum adalah pembayaran -pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut S. Munawir (dalam Josef Riwu Kaho 2006:170) retribusi merupakan iuran

kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran.

Pengertian retribusi daerah dapat dilihat dari pendapat-pendapat sebagai berikut. Panitia Nasrun (dalam Josef Riwu Kaho 2006:171) menjelaskan bahwa retribusi Daerah sebagai berikut: retribusi daerah yaitu pungutan daerah atas dasar pembayaran dari penggunaan layanan jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat baik yang didapatkan secara langsung atau tidak langsung.

Dalam Pasal 37 UU Nomor 22 Tahun 1984 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai pengganti (kerugian) diensten yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diensten itu.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi daerah yaitu pungutan daerah atas dasar pemakaian atau penggunaan layanan jasa oleh masyarakat yang telah disediakan pemerintah daerah.

Josef (2006:171) mengemukakan bahwa ciri –ciri Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a. retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung ditunjuk;
- c. siapapun yang menggunakan layanan jasa yang disediakan pemerintah maka akan dikenakan retribusi.

Dalam Pasal 8 UU Darurat No. 12/1957 disebutkan adanya 6 jenis/macam retribusi yang dapat dipungut Daerah yakni: uang leges; uang tol/bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan; bea pembantaian dan pemeriksaan; uang sempadan dan izin bangunan; retribusi atas pemakaian tanah; dan bea penguburan.

4. Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:18) yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek dari retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang telah diberikan atau disediakan pemerintah daerah demi tujuan kepentingan dan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh badan, pribadi maupun umum Retribusi Jasa Usaha

Mardiasmo (2006:19) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

b. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Mardiasmo (2006:20) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada badan atau pribadi yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan memanfaatkan ruang, barang, sarana prasarana, penggunaan sumber daya alam maupun penggunaan fasilitas tertentu untuk kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Mardiasmo (2006:21) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memerhatikan biaya layanan jasa yang bersangkutan, aspek keadilan efektifitas layanan tersebut maupun kemampuan masyarakat. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- b. Retribusi Jasa Usaha, apabila layanan jasa usaha dilakukan secara efisien serta orientasi harga sesuai harga pasar, maka retribusi jasa usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan yang layak.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di

sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Retribusi adalah pungutan secara langsung yang dikenakan kepada pengguna jasa yang menerima manfaat langsung yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan retribusi sektor pariwisata memegang peran penting karena dengan adanya pengelolaan yang baik maka akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang di sektor retribusi wisata.

6. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari atas dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *wisata* berarti “pergi” atau “bepergian”. Menurut Yoeti (dalam I Ketut Suwena 2017:15) pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.

Menurut UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah beberapa wisata yang disediakan oleh masyarakat dengan berbagai fasilitas.

b. Jenis dan Macam Pariwisata

Suwena dan Widyatmaja (2017:19) mengatakan kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kegiatan. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Disamping itu dalam mengembangkan pariwisata itu sendiri, perlu dibedakan antara pariwisata jenis lainya agar jenis atau macam-macam pariwisata lainya dapat dikembangkan sesuai harapan.

c. Dampak Pengembangan Pariwisata

Menueut Suwena dan Widyatmaja (2017:163) Dampak pariwisata dinilai bersifat negatif apabila menimbulkan perubahan – perubahan yang tidak diinginkan atau merugikan eksistensi kebudayaan masyarakat setempat. Sebaliknya dampak pariwisata dinilai positif apabila mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, revitalisasi dan konservasi bagi eksistensi kebudayaan masyarakat setempat, serta pelestarian lingkungan.

Suvena dan Widyatmaja (2017:163) Pariwisata memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk memperoleh berbagai manfaat dengan cara menawarkan barang atau jasa yang lazim pula disebut produk wisata. Produk wisata tersebut terdiri tiga jenis yaitu :

- 1) Daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk pula citra yang dibayangkan oleh wisatawan;
- 2) Fasilitas di daerah tujuan wisata yang mencakup akomodasi, usaha pengolahan makanan, hiburan, dan rekreasi; dan Kemudahan – kemudahan mencapai daerah tujuan wisata.

7. Pengelolaan Retribusi Pariwisata

a. Pengelolaan Retribusi Pariwisata

Pengelolaan Retribusi pariwisata adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan pada tempat wisata yang ditentukan oleh perda dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi pariwisata sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Menurut James A. F. Stoner (2003:4) proses ini merupakan serangkaian tindakan yang

terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang harus menjalankan empat fungsi di atas secara seimbang, hal ini dikarenakan keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka fungsi pengelolaan retribusi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dan kondisi di waktu sekarang. Penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pariwisata seperti perencanaan penentuan target, fasilitas pada tempat wisata, dan lain-lain.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan aspek yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuannya adalah mengelompokkan, mengatur, membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing – masing. Contohnya seperti seksi pengembangan pariwisata.

3) Kepemimpinan (*leading*)

Adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok itu. Para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus

dilakukan tetapi juga dapat memengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Seperti pimpinan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan suatu tugas, maka pimpinan tersebut juga dapat memengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan.

4) Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang telah diatur sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan seperti pengawasan yang bersifat membimbing.

Lebih lanjut Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul *General and Industrial Management* membahas fungsi administrasi dan manajemen. Henry Fayol mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah:

1) Perencanaan (*planning*),

Perencanaan tujuan perusahaan atau organisasi dan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang ada. Perencanaan terbagi menjadi dua yaitu perencanaan strategi dan perencanaan operasional.

2) Pengorganisasian (*organizing*),

Pengorganisasian atau sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya modal, dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan perusahaan.

3) Pemberian komando (*commanding*),

Fungsi pemberian komando sama dengan mengarahkan (*actuating*). *Commanding* dilaksanakan dengan memberikan arahan kepada karyawan atau bawahan untuk menyelesaikan tugas bawahan masing-masing. Selain itu, *commanding* dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4) Pengkoordinasian (*coordinating*),

Pengkoordinasian adalah salah satu fungsi manajemen dalam melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekocokan, kekacauan, dan kekosongan kegiatan, dengan cara menghubungkan, menyatukan dan menyesuaikan pekerjaan sehingga terjadi kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

5) Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk membuktikan, memastikan, dan memantau semua kegiatan yang telah diorganisasikan, direncanakan, dikondisikan, dan

diperintahkan sebelumnya dapat berjalan sesuai keinginan atau tujuan organisasi.

Ditinjau dari segi filsafat administrasi dan manajemen-khususnya ditinjau dari segi fungsi penggerakan bawahan, fungsi terpenting yaitu fungsi *commanding*.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Retribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata faktor diartikan sebagai keadaan, hal, atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.

Adapun arti dari kata pendukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sifatnya menunjang serta membantu dan lain sebagainya.

Sementara arti dari penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, maksudnya adalah membuat suatu pekerjaan dan semacamnya tidak berjalan lancar, lambat atau tertahan.

Menurut Susilo dan Halim (2002:49) belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana ada tiga faktor :

a) Penerimaan target belum terealisasi ini dilihat dari :

1) Sistem penentuan target yang didasarkan pada data histories,

2) Belum dimilikinya data dasar mengenai sumber penerimaan

b) Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan ini dikarenakan :

1) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi,

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan
- c) Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana dilapangan serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak dan retribusi.

Berdasarkan pengertian diatas ditarik kesimpulan bahwa faktor pendukung merupakan keadaan yang mempengaruhi yang sifatnya turut menunjang atau membantu dan sebagainya terjadinya sesuatu. Sedangkan faktor penghambat yaitu keadaan yang mempengaruhi pekerjaan atau semacamnya tidak berjalan lancar.

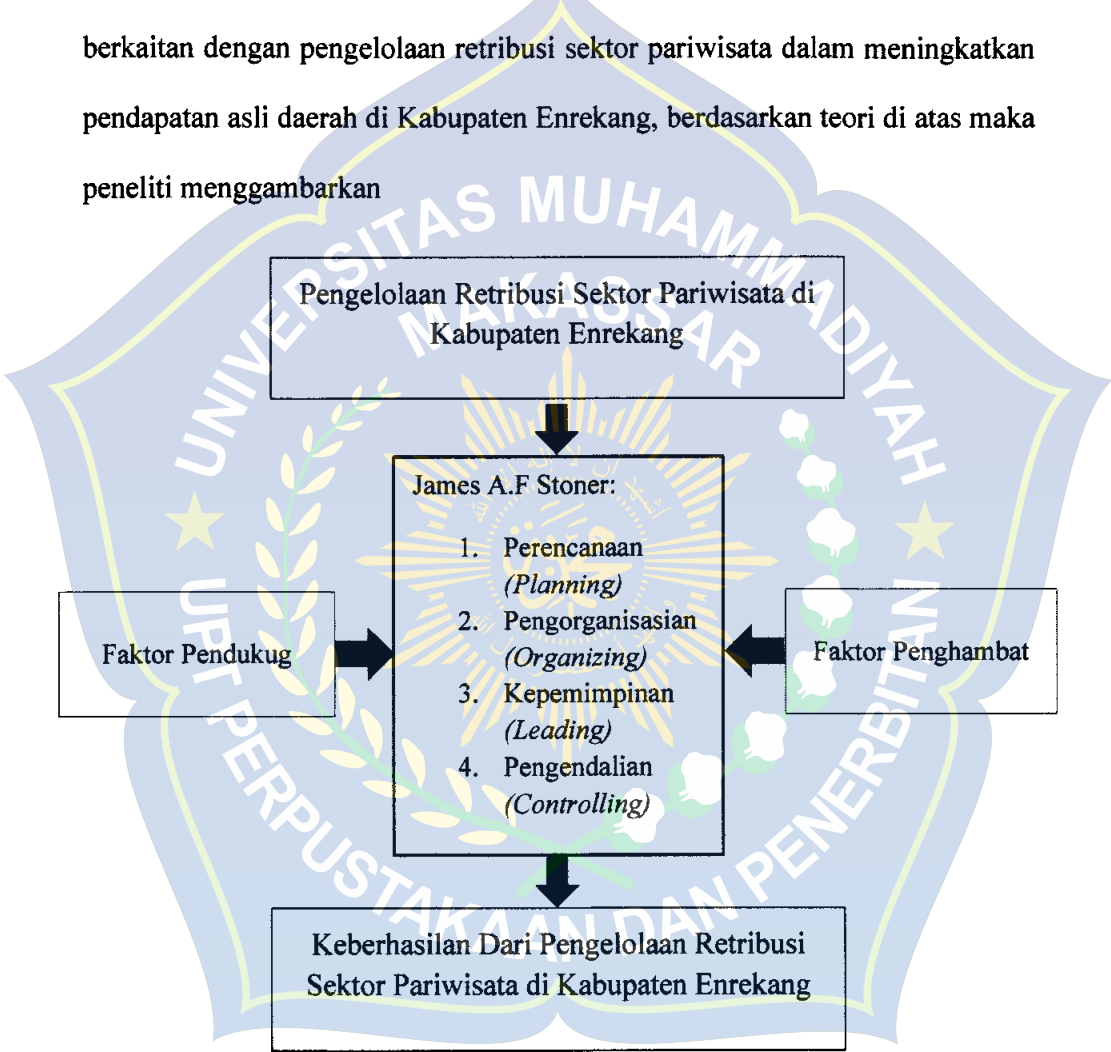
C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang untuk mengetahui pengelolaan retribusi terutama pada sektor pariwisata. Kontribusi dari sektor pariwisata Pemerintah Kabupaten Enrekang terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah maka akan menunjukkan kualitas Otonomi Daerah tersebut akan meningkat. Retribusi sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang sehingga dapat membantu meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang.

Penelitian tentang pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang akan dianalisis berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh James

A.F Stoner yaitu: (1) perencanaan (*planning*), (2) pengorganisasian (*organizing*), (3) kepemimpinan(*Leading*), dan (4) pengendalian(*Controlling*).

Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh James A.F Stoner yang memberikan gambaran kepada penulis dalam membuat kerangka pikir yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang, berdasarkan teori di atas maka peneliti menggambarkan



Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang, yaitu peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang mengenai pengelolaan retribusi khususnya pada sektor pariwisata. Indikator pengelolaan berdasarkan teori yang digunakan yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Kepemimpinan (*Leading*)
4. Pengendalian (*Controlling*)

Selain indikator pengelolaan di atas adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-sub dari fokus penelitian pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang, adalah :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan mengenai pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang dibuat dengan lebih awal mengetahui target retribusi pada objek wisata Villa Bambapuang serta Permandian Alam Lewaja dengan cara menggambarkan atau merumuskan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yang dilakukan pada kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk menghimpun dan mengatur mengenai siapa saja yang bertugas melakukan pemungutan retribusi serta mengenai pembukuan dan juga pelaporan terhadap retribusi pariwisata. Pengelolaan retribusi di Kabupaten Enrekang akan berjalan dengan baik jika adanya pengelompokan, penyusunan kegiatan, dan penempatan anggota dengan tepat.

3. Kepemimpinan (*Leading*)

Setelah menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya maka pimpinan mendorong semua anggota yang telah ditempatkan sesuai dengan posisi agar segera mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang biasa dihadapi oleh pemimpin serta bagaimana seorang pemimpin mengatasi kendala yang diterima. Segala kegiatan mengenai pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang agar berjalan sesuai dengan tujuan maka pimpinan ikut serta dalam membantu anggotanya bekerja sebaik mungkin

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengawasan sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses pengelolaan, karena itu harus dilakukan dengan baik. Walaupun pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berjalan dengan baik tetapi jika pengendalian tidak berjalan dengan baik maka pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang maka tujuannya tidak dapat dicapai

dengan baik. Pengendalian pada Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Enrekang untuk mengetahui siapa saja yang akan diawasi.

5. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung dan bersifat mendukung semua kegiatan pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang.

6. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yaitu faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata Kabupaten Enrekang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (Dua) bulan yaitu pada bulan September sampai Oktober. Penentuan lokasi ini berdasarkan atas dasar pertimbangan bahwa di kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Enrekang, merupakan instansi yang melakukan pengeloaan retribusi sektor pariwisata dan menjadi problem berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dilatar belakang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan dimana peneliti menggunakan landasan teori untuk menjadi bahan referensi sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini berfokus pada studi kasus yang merupakan sebuah penelitian rinci mengenai sebuah objek penelitian. Alasan pemilihan pendekatan studi kasus membuat penelitian dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dari kasus tersebut. Penelitian ini penulis mendeskripsikan kenyataan-

kenyataan yang terjadi yang diteliti penulis untuk mendapatkan data yang objektif dan relevan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari informan atau obyek peneliti yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang. Untuk mendapatkan data tersebut dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan wawancara kepada informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data – data yang tertulis dan digunakan sebagai faktor pendukung dalam analisis data primer. Data ini berupa dokumen – dokumen tertulis, foto, dan lainnya. Yang terkait dengan pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang.

D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang akan memberikan kita data ataupun informasi mengenai masalah yang diteliti tentang pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang. Adapun informan penelitian yaitu :

Tabel 3.1 Informan Peneliti

No	Informan	Jabatan	Kode
1.	Dadang Sumarna S.Pd., M.Pd	Kepala Dinas	DS
2.	Fitria, SS., M.AP	Kasubag Perencanaan	FT
3.	Suwarningsih, SP	Kasi Sarana dan Prasarana dan Jasa Pariwisata	SN
4.	Audiyah Islamiati, SP	Kasubag Keuangan	AI
5.	Muh. Amin Dalle, SP., M.Si	Sekretaris	AD
6.	Eka Febriyanzah, S.Ksi	Kasi Bina Usaha dan Daya Tarik Wisata	EF
7.	Syaifulhaq, SE	Kasubag Umum	SU
8.	Rifaldy	Pengunjung Wisata Permandian Alam Lewaja	RF
9.	Nurul	Pengunjung Wisata Villa Bambapuang	NR

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, yaitu dalam hal ini peneliti datang ketempat kegiatan subjek yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan teknik ini peneliti mengamati dan mengadakan observasi terkait pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk menggali data yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antar peneliti dan

informan yang bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam. Untuk keperluan wawancara ini, maka peneliti membuat pedoman wawancara kepada informan menggunakan alat yang digunakan yaitu panduan wawancara sebagai acuan untuk melakukan wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan dokumen yang ada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder dari sebuah informan. Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data untuk mendapatkan informasi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan pengelolaan retribusi pasar atau pada fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuka fokus, mengabaikan hal-hal yang tidak dibutuhkan dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat

memberikan sebuah simpulan terkait dengan objek penelitian. Data ini dikelompokkan sesuai dengan objek penelitian sehingga proses dalam mereduksi data tidak berjalan dengan waktu yang lama.

2. Penyajian Data

Langkah dalam penyajian data adalah membandingkan dan menghubungkan semua data baik data primer maupun data sekunder, guna membagi konsep bermakna. Penyajian data bertujuan untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks narasi deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal penelitian penulis mengumpulkan data dan harus mengerti apa arti hal-hal yang telah ditemui dan didapatkan di lapangan dan mencatat sebab-akibat yang telah terjadi serta berbagai proporsi sehingga dilakukan penarikan kesimpulan dan dipertanggungjawabkan. Maka selanjutnya melakukan interpretasi terhadap data dan pematangan hasil yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah penafsiran terhadap kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Validasi dalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir sebuah penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif yakni melalui:

1. Triangulasi sumber yakni membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan hasil wawancara informan lainnya dan beberapa informasi lainnya yang terakut dengan objek penelitian.
2. Triangulasi teknik yakni untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan melakukan pemeriksaan data terhadap berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya hasil wawancara dicetak ataupun dibandingkan dengan hasil dokumentasi maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3. Triangulasi waktu yakni mengecek semua hasil wawancara berulang-ulang kali dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sebuah data akurat dan valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Enrekang terletak $\pm$ 240 km di sebelah Utara Kota Makassar atau secara geografis terletak antara $3^{\circ}14'36''$ - $3^{\circ}50'0''$ Lintang Selatan dengan $119^{\circ}40'53''$ - $120^{\circ}6'33''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 kecamatan yang tersebar dalam 112 desa dan 17 kelurahan dan memiliki luas wilayah sekitar 1.786,01 Km² atau 178.601 Ha. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah $\pm$ 2.86 persen dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. ODP ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

1. Visi dan Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang

Visi : “terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan rekigius”

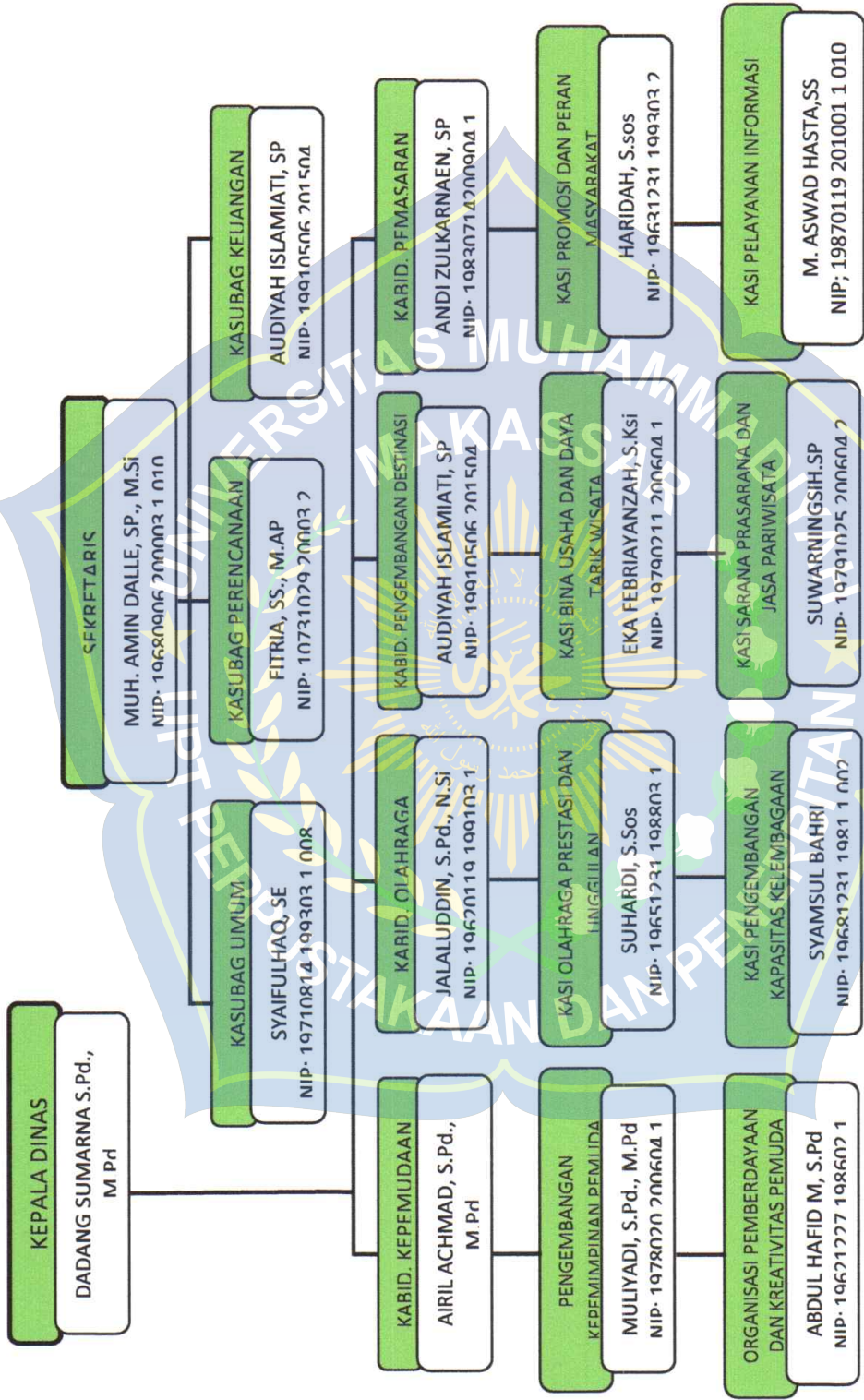
Misi :

- a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing penguasaan teknologi, bermoral dan berimtaq.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi gender.
- d. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri.
- e. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

2. Struktur Organisasi

Sebagai lembaga pemerintah daerah maka Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Enrekang sebagai mana yang diatur di dalam peraturan daerah kabupaten enrekang No. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten enrekang maka Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata mempunyai struktur organisasi sebagai mana yang terlihat pada bagan berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA



3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

- 1) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
 - b) Menyusun program dan kegiatan di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
 - c) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait menyangkut Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
 - d) Merekomendasikan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
 - e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data informasi serta evaluasi kegiatan di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
 - f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 3) Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- b) Penyusunan rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata.
- c) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- d) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas.
- e) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

- 1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kpela Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional kerja Sekretaris Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Mengkoordinasi segala kegiatan antar bidang dalam lingkup dinas.
- c) Mengatur dan membina kerja sama dalam pengelolaan administrasi dinas.
- d) Memberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja dinas.
- e) Mengatur urusan tata usaha, keuangan, asset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian.

3) Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program kegiatan sub bagian.
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tang dan pelengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan dan program sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja.
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
- c) Mengumpulkan, megolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian.
- d) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumah tanggaan lainnya.
- e) Melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan dan sasaran kerja pegawai di lingkup Dinas.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian.

- b) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program/kegiatan dinas serta kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Merencanakan kegiatan dan program Kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan.
 - c) Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 - d) Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran.
 - e) Menyiapkan penyusunan dokumen pengguna Anggaran Dinas.
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a) Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan.
 - b) Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian keuangan.
 - d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian Keuangan.
 - e) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kepala Sub Bagian Perencanaan
- 1) Sub Bagian Perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program/kegiatan dinas.

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan.
- c) Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas.
- d) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik dinas.
- e) Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara kegiatan dinas.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian perencanaan.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian Perencanaan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Bidang Kepemudaan

- 1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang kepemudaan.
- 2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Bidang Kepemudaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan tugas dan fungsinya pada masing-masing kepala seksi.
 - c) Memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 - d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e) Menyelenggarakan urusan pemberdayaan dan kreatifitas pemuda.
- 3) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Kepemudaan.
 - b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kepemudaan.
 - c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Bidang Kepemudaan.

d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Bidang Kepemudaan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

2) Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b) Menghimpun dan memahami peraturan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugasnya dan belum dilaksanakan.

d) Mengikuti rapat-rapay sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Melaksanakan pelayanan administrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas.

3) Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda.
 - 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Kreatifitas Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Keatifitas Pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Menghimpun dan memahami peraturan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang lebih dan belum dilaksanakan.
- d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- e) Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.

3) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Kepala Bidang Olahraga

- 1) Bidang Olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Olahraga.

2) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Bidang Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- c) Mengikuti rapat-rapat dengan bidang tugasnya.
- d) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep perumusan kebijakan teknis yang meliputi data dan informasi pengembangan dan monitoring program, serta evaluasi dan pelaporan.
- e) Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan.

3) Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan Bidang Olahraga.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Olahraga.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Olahraga.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Bidang Olahraga.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Kepala Seksi Olahraga Prestasi dan Unggulan

- 1) Seksi Olahraga Prestasi dan Unggulan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kegiatan di bidang Olahraga Prestasi dan Unggulan.
- 2) Kepala Seksi Olahraga Prestasi dan Unggulan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga Prestasi Dan Unggulan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk kepada pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - c) Memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 - d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyediaan fasilitas sarana prasarana olahraga prestasi dan unggulan.
- 3) Kepala Seksi Olahraga Prestasi dan Unggulan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Seksi Olahraga Prestasi Dan Unggulan.
 - b) Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Olahraga Prestasi Dan Unggulan.
 - c) Melakukan pengawasan administrasi dalam rangka kegiatan olahraga prestasi dan unggulan.

- d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi olahraga prestasi dan unggulan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

k. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Olahraga

- 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kegiatan di bidang Kelembagaan Sarana Prasarana dan Olahraga.
- 2) Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan.
 - d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Bina Usaha Dan Daya Tarik Wisata.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Bina Usaha Dan Daya Tarik Wisata.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

n. Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Jasa Pariwisata

- 1) Seksi Sarana Dan Prasarana Dan Jasa Wisata di pimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan kegiatan di bidang sarana prasarana dan jasa pariwisata.
- 2) Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan seksi sarana prasarana dan jasa pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - c) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 - d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

- e) Menyiapkan bahan rekomendasi dan perizinan Sarana Prasarana Dan Usaha Jasa Pariwisata.

3) Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Jasa Pariwisata mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Dan Jasa Pariwisata.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Dan Jasa Pariwisata.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Sarana Prasarana Dan Jasa Pariwisata.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Sarana Prasarana Dan Jasa Pariwisata.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

- 1) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pemasaran pariwisata.
- 2) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang pemasaran pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan tugas dan fungsi kepada masing-masing kepala seksi.

c) Memantau, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.

d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Melaksanakan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

3) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata.

b) Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata.

c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata.

d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

p. Kepala Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat

- 1) Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat Di pimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kegiatan dibidang promosi dan peran masyarakat.
- 2) Kepala Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - c) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan.
 - d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
 - e) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang sadar wisata.
- 3) Kepala Seksi Promosi Dan Peran Mansyarakat mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat.
 - b) Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat.

- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Promosi Dan Peran Masyarakat.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

q. Kepala Seksi Pelayanan Informasi

- 1) Seksi Pelayanan Informasi di pimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membentuk kepala bidang melaksanakan kegiatan bidang pelayanan informasi.
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dan telah di laksanakan.
 - d) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Melaksanakan pengembangan pelayanan informasi secara terpadu.

3) Kepala Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi.
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pelayanan Informasi.
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pelayanan Informasi.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Objek Wisata Kabupaten Enrekang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diusahakan dapat berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta memiliki ciri khusus dari sektor lain yaitu dapat menjaga kelestarian lingkungan. Sektor kepariwisataan merupakan sumber devisa yang cukup besar persentase dan kontribusinya bagi kas daerah, yang secara luas juga merupakan sumber devisa negara.

Kabupaten Enrekang memiliki banyak potensi dan daya tarik sendiri dibidang pariwisata untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal, luar daerah ataupun wisatawan asing. Terdapat banyak tempat wisata di Kabupaten

Enrekang tahun 2019 lebih dari 50.000 wisatawan mengunjungi Kabupaten Enrekang. Potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Enrekang merupakan objek wisata yang mempunyai prospek cukup baik sebagai daerah tujuan wisata karena mempunyai potensi alam yang sangat mendukung. Berikut daftar wisata yang ada di Kabupaten Enrekang:

Tabel 4.1
Objek Wisata di Kabupaten Enrekang

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Permandian Alam Lewaja	Kecamatan Enrekang
2.	Lo'ko Bubau	Kecamatan Baraka
3.	Situs Tontonan	Kecamatan Anggeraja
4.	Bunker Jepang	Kecamatan Anggeraja
5.	Villa Bambapuang	Kecamatan Anggeraja
6.	Buntu/Buttu Kabobong	Kecamatan Anggeraja
7.	Gunung Latimojong	Kecamatan Baraka
8.	Kebun Raya Enrekang	Kecamatan Maiwa
9.	Dante Pine	Kecamatan Anggeraja
10.	Buttu Macca	Kecamatan Anggeraja

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Enrekang

Namun dari sekian banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Enrekang hanya ada dua objek wisata daerah yang bakal fokus dikembangkan. Kedua objek wisata itu adalah Villa Bambapuang dan Permandian alam lewaja yang selebihnya masih dikelola oleh pihak swasta. Saat ini kedua objek wisata itu sudah mulai digarap dan dibenahi agar lebih maksimal. Kedua objek pun sudah mendapat sejumlah anggaran baik pengadaan sarana dan juga perbaikan.

5. Retribusi Penerimaan Villa Bambapuang dan Permandian Alam
Lewaja 3 Tahun Terakhir

Tabel 4.2
Jumlah Retribusi Villa Bambapuang dan Permandian Alam Lewaja

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2017	400.000.000	274.470.000	68,61
2.	2018	400.000.000	336.500.000	84,12
3.	2019	400.000.000	281.500.000	70,37

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Enrekang

Pada tabel tersebut diatas terlihat bahwa penentuan target retribusi untuk villa bambapuang dan permandian alam lewaja 3 tahun terakhir di tetapkan sebesar 400.000.000 setiap tahunnya namun realisasinya 274.470.000 setiap tahun terlihat bahwa pada tahun 2017 mencapai 68,61%, namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan penerimaan yaitu dari target 400.000.000 terealisasi sebesar 336.500.000 atau 84,12%, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan yaitu dari target 400.000.000 hanya terealisasi sebesar 281.500.000 atau 70,37%.

B. Hasil Penelitian

Pengelolaan retribusi sektor pariwisata merupakan sebuah tindakan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan potensi alam hingga sumberdaya manusia yang ada. Dengan terkelolanya sebuah kawan wisata dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen diharapkan dapat semakin menarik perhatian masyarakat untuk datang berwisata. Peneliti kemudian lebih lanjut akan membahas bagaimana pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang

dengan indikator pengelolaan pertama yaitu (1) Perencanaan (*Planning*), (2) Pengorganisasian (*Organizing*), Kepemimpinan (*Leading*), Pengendalian (*Controlling*). Selain indikator pengelolaan adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Adapun pembahasan mengenai hal di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien. Dalam proses perencanaan yaitu, untuk mengetahui tahapan awal dalam perencanaan, penentuan target retribusi, serta penentuan target retribusi yang berubah-ubah di Kabupaten Enrekang.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak DS selaku Kepala Dinas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang mengenai tahapan awal dalam perencanaan pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang hal yang dikemukakan informan adalah:

“Jadi tahapan awal yang kita lakukan dalam penentuan perencanaan ini adalah menentukan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) setelah menentukan RKA baru kita lanjutkan dengan penentuan berapa PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada setiap lokasi wisata yang dikelola oleh pihak kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang. (wawancara 23 September 2020)”.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, dalam penentuan awal perencanaan target retribusi yaitu menentukan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) berupa dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta rencana pembiayaan dan prakiraan maju untuk berikutnya setelah menentukan RKA dilanjutkan dengan penentuan PAD pada setiap lokasi wisata yang dikelola oleh dispopar seperti Villa Bambapuang dan Permandian Alam Lewaja.

Selanjutnya mengenai masalah penentuan target retribusi FT menyatakan bahwa:

“Masalah penentuan target retribusi sebenarnya itu yang menentukan adalah Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tetapi juga tetap berkoordinasi dengan orang kantor di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, jadi disini petugas retribusi tidak ada hubungannya dengan penentuan target retribusi Cuma OPD dan Bapenda. (wawancara 23 September 2020)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa yang menentukan target retribusi adalah Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) namun berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Selain masalah penentuan target retribusi FT yang selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang juga menjelaskan mengenai penentuan target retribusi yang berubah-ubah:

“penentuan target retribusi itu akan berubah jika ada hal-hal yang bisa berdampak pada pencapaian target seperti dengan sekarang ini karena adanya pandemi Covid-19 sehingga anggaran menjadi berubah. Jadi itu target yang sudah ditetapkan sebelumnya di rubah karena anggaran menjadi menurun sementara target masih tetap

harus dicapai. Seperti covid ini kita dikejar target sementara orang di larang ngumpul dan wisata ditutup untuk sementara. Jadi untuk mencapai target pasti ndabisa makanya target bisa sj dirubah dalam situasi tertentu. Jadi ada situasi tertentu yang bisa menimbulkan perubahan pada target PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena besar kemungkinan target itu tidak akan tercapai. Kalau seperti situasi saat ini (pandemi covid-19) yang kita tauji salah satu sektor yang paling merasakan dari dampak ini adalah sektor wisata karena wisatawan tidak dapat berkunjung karena takut bahkan objek wisata ditutup untuk sementara karena orang-orang takut terjangkit. Tetapi sebelum adanya pandemi ini penentuan target tidak berubah karena jika tidak ada ji hal-hal yang menimbulkan yang bisa berdampak pada pencapaian target maka target retribusi tidak akan dirubah. (wawancara 23 September 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa perubahan target retribusi akan terjadi jika ada hal-hal yang mempengaruhi terdapat pencapaian target retribusi yang telah ditentukan karena ada beberapa situasi yang mempengaruhi pencapaian target seperti sekarang ini adanya pandemi covid-19, tetapi jika tidak ada hal yang mempengaruhi target maka target retribusi itu tidak akan dirubah.

Selanjutnya mengenai perencanaan peningkatan retribusi wisata di Kabupaten Enrekang FT menyatakan bahwa :

“yang kita lakukan agar retribusi wisata pada villa bambapuang dan permandian alam lewaja lebih menunjang yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang seperti pada permandian alam lewaja itu kita membangun wahana permandian disamping itu juga kita memperbaiki jalan yang rusak agar memudahkan akses bagi pengunjung. (wawancara 12 Februari 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa agar retribusi pada villa bambapuang dan permandian alam lewaja dapat meningkatkan hal yang dilakukan yaitu meningkatkan sarana dan

prasarana yang menunjang serta melakukan perbaikan jalan agar memudahkan akses bagi pengunjung.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah diperoleh dapat dikatakan bahwa tahapan awal dalam perencanaan pengelolaan retribusi sektor pariwisata yaitu penentuan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) pelaksanaan anggaran merupakan tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. RKA dapat berupa informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti juga diperoleh bahwa penentuan target retribusi sektor pariwisata ditentukan oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Enrekang. dalam hal penerimaan daerah yang bersumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) diwujudkan pada masing-masing daerah melalui kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi. Target yang telah ditentukan oleh BAPENDA juga dapat berubah jika terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian target retribusi sektor pariwisata yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pengorganisasian

Dalam struktur organisasi terdapat komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. struktur pada pengorganisasian menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan berbeda-beda tersebut di koordinasikan. Selain daripada itu pengorganisasian juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan dan menyampaikan laporan. Dalam proses pengorganisasian yaitu untuk mengetahui pengelompokkan mengenai siapa saja yang bertugas melakukan pemungutan retribusi dan juga mengenai pembukuan dan pelaporan terhadap retribusi pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang.

Penulis melakukan wawancara dengan DS selaku Kepala Dinas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang dengan pertanyaan mengenai siapa sajakah yang bertugas melakukan pemungutan retribusi pariwisata di Kabupaten Enrekang. Hal yang dikemukakan informan adalah:

“disini yang ditugaskan dalam pemungutan retribusi pada setiap tempat wisata yang dikelola oleh pihak kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah anak honor. Ada beberapa anak honor yang memang kita berikan SK untuk melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan tempat objek wisata yang sudah ditentukan baik itu pada villa bambapuung maupun pemandian alam lewaja. (wawancara 23 September 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa pihak Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Enrekang memberikan tugas kepada anak honor sesuai dengan SK yang telah

ditentukan terlebih baik itu pada objek wisata villa bambapuang ataupun permandian alam lewaja.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, maka peneliti melakukan wawancara dengan SN selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dan Jasa Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“pungutan retribusi yang kita ambil hanyalah dari objek wisata yang dikelola, sedangkan objek wisata yang tidak dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang itu kita sama sekali tidak berhak misalnya pada objek wisata Dante Pine itu dikelola oleh pihak swasta jadi kita dari pihak kantor hanya bisa mengawasi saja tetapi masalah keuangannya itu sama sekali bukan urusan kita. Berbeda dengan objek wisata yang dikelola langsung oleh pihak kantor memang ada bendahara penerimanya atau kita sebut kolektor nantinya kolektor ini yang akan menyeter ke kas daerah. (wawancara 24 September 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat mengetahui bahwa kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang hanya melakukan pengawasan terhadap objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta, berbeda dengan objek wisata yang dikelola langsung oleh pihak kantor itu memang memiliki bendahara penerima.

Mengenai pembukuan dan pelaporan terhadap retribusi pariwisata AI selaku Kepala Sub Bidang Keuang pada kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“memang ada pembukuannya oleh bendahara penerima yaitu awalnya dari petugas memungut retribusi dari setiap wisata yang dikelola lalu di serahkan ke kolektor dari kolektor di serahkan ke bendahara penerima dan terakhir di serahkan ke kas daerah. (wawancara 27 September 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat mengetahui bahwa ada beberapa tahapan dalam pembukuan dan pelaporan terhadap retribusi sektor pariwisata mulai dari pemungutan retribusi di setiap wisata yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang sampai dengan tahap penyerahan hasil retribusi ke kas daerah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan tersebut dapat dikatakan bahwa pembagian kerja seperti pemungutan retribusi pada wisata yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dilakukan oleh anak honorer yang sebelumnya telah diberikan SK untuk melakukan pemungutan retribusi. Pemungutan retribusi yang terutang dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, atau sejenisnya. Pemungutan retribusi yang diambil oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang hanya dari objek wisata yang dikelola seperti Villa Bambapuang dan Permandian Alam Lewaja diluar itu pihak Kantor tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pungutan retribusi.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan berarti mengarahkan, mengontrol para bawahan agar lebih bertanggung jawab dan semua bagian pekerjaan terkoordinasi demi mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin harus seorang yang menumbuhkan dan mengembangkan segala

yang terbaik dalam diri para bawahannya. Secara sederhana pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain. Dalam tahap kepemimpinan yaitu untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang biasa di hadapi oleh pemimpin serta bagaimana seorang pemimpin mengatasi kendala yang ditemui.

Penulis melakukan wawancara dengan DS selaku Kepala Dinas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang dengan pertanyaan mengenai bagaimana seorang pemimpin mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan retribusi pariwisata. Hal yang dikemukakan informan adalah:

“ada beberapa cara yang kita lakukan dalam mengatasi kendala-kendala yaitu pertama kita mengatasi terlebih dahulu hambatan-hambatan dalam pembayaran retribusi agar pencapaian pendapatan asli daerah sedikitnya bisa tercapai selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita meningkatkan pengawasan baik itu pengawasan yang kita lakukan pada lokasi wisata maupun pengawasan di kantor dan kita juga sering mengadakan pertemuan rutin sehingga akan terbentuk hubungan yang baik antara orang kantor sendiri dan juga kepada orang-orang luar kantor yang dipercayakan untuk menjaga wisata yang dikelola oleh pihak dispopar baik itu villa bambapuang atau permandian alam lewaja. (wawancara 23 September 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka dapat diketahui bahwa pemimpin pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam menghadapi kendala-kendala memiliki beberapa cara salah satunya yaitu meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya dan juga mengadakan pertemuan rutin.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak AD selaku Sekretaris pada Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa:

“selain melakukan pengawasan kita juga meningkatkan kerjasama dan sistem kekerabatan agar terjalin ikatan dan hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Tetapi dengan melakukan pengawasan maupun peningkatan kerjasama itu belum tentu cukup dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan, makanya kita juga harus mengambil tindakan langsung salah satunya itu dengan cara kita carikan solusi mengenai masalah apa yang terjadi baru setelah itu kita menindak lanjuti masalah itu supaya nanti dalam menangani masalah tersebut tidak salah-salah mi lagi. (wawancara 23 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa selain pengawasan juga ada peningkatan kerjasama tetapi tidak cukup sampai disitu pihak kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga melakukan tindakan langsung dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi salah satunya yaitu mencari solusi sesuai dengan masalah apa yang terjadi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada DS selaku Kepala Dinas pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengenai apakah pemimpin ikut langsung dalam mengawasi pengelolaan retribusi yang menyatakan bahwa:

“namanya pemimpin yah pasti terlibat, karena tentunya kita tidak ingin terjadi masalah atau yah katakanlah penyimpangan, kita tidak bisa membiarkan anggota kita melakukan tugas sendiri-sendiri karena dalam pemerintahan itu dibutuhkan yang namanya kerjasama supaya lebih efektif (wawancara 23 September 2020)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa pemimpin dalam mengawasi bawahannya turut ikut langsung karena

diketahui dalam pemerintahan dibutuhkan kerjasama agar suatu pekerjaan lebih efektif.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, maka peneliti melakukan wawancara dengan AD selaku Sekertaris pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“pastinya ikut dan tentunya dibantu sama pegawai kantor yang lain dan yah minimal kita lakukan rapat evaluasi sebulan sekali atau dua kali supaya kita tahu, apa-apa saja yang terjadi di lapangan supaya kalau ada masalah langsung kita atasi segera atau kita berikan solusi untuk selesaikan masalah yang terjadi. (wawancara 23 September 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa pemimpin dalam mengawasi bawahannya juga dibantu oleh pegawai kantor yang lain selain itu pada kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebissa mungkin melakukan rapat evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang sedang terjadi dan sesegara mungkin mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah diperoleh dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada pengelolaan retribusi sektor pariwisata yaitu pemimpin di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang senantiasa meningkatkan pengawasan yang dilakukan. Pengawasannya menyangkut semua aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan dalam pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Enrekang. Tidak hanya meningkatkan pengawasan pimpinan pada Dinas

Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang juga senantiasa mengadakan pertemuan rutin dengan bawahan hal ini dilakukan agar mengetahui masalah-masalah apa saja yang sedang terjadi dilapangan sehingga secepat mungkin permasalahan yang dihadapi jalan keluarnya dapat ditemukan.

4. Pengendalian

Fungsi pengendalian ini terkait erat dengan fungsi perencanaan, karena pada dasarnya pengendalian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Pengendalian bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Dalam tahap pengendalian ini untuk mengetahui siapa saja yang menjadi objek untuk diawasi dalam pengelolaan retribusi serta kapan dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan.

Penulis melakukan wawancara dengan DS selaku Kepala Dinas di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang dengan pertanyaan mengenai siapa sajakah yang menjadi objek untuk diawasi dalam pengelolaan retribusi. Hal yang dikemukakan informan adalah:

“yang kita awasi yaitu petugas loket jadi kepala seksi yang hampir setiap hari ke lokasi pemungutan retribusi mengawasi semua kegiatan yang ada di dalam mulai dari pemeliharaan, operasional, dan tiketnya. (wawancara 23 september 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepala seksi yang turun langsung ke lokasi pemungutan retribusi dan mengawasi hampir keseluruhan kegiatan yang ada di tempat wisata.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu EF selaku Kasi Bina Usaha dan Daya Tarik Wisata di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang mengenai bentuk pengawasan yang ada pada pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Enrekang yang mengatakan:

“pengawasan ekstern Bapenda yang mengawasi secara ekstern tapi pengawasan intern oleh pihak kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sendiri yang harus melaksanakannya sebagai tugas pokok kita disini. OPD yang mengelola objek wisata sumber pendapatan secara intern harus diawasi karena kita bertanggungjawab jadi kita secara langsung mengawasinya. (wawancara 27 September 2020)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa terdapat dua bentuk pengawasan yaitu pengawaasan ekstern yang dilakukan oleh pihak Bapenda dan pengawasan interen yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata selaku OPD yang terkait.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan SU selaku Kasubag Umum Kepegawaian pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengenai kapan pengawasan itu dilakukan oleh petugas yang menyatakan:

“kalau pada pengawasan ekstern yang dilakukan Bapenda mereka yang tentukan, tapi pada pengawasan intern yang dilakukan oleh OPD hampir setiap hari karena setiap ada penerima langsung disetor minimallah satu minggu karena biasanya yang paling ramai itu pada hari sabtu minggu makanya minimal sabtu minggu itu harus ada pegawai yang kesana karena hari-hari lain itu pengunjung tidak terlalu banyak mungkin ada tapi satu dua tapi biasanya yang paling ramai itu pada hari sabtu minggu. (wawancara 27 September 2020)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bapenda itu ditentukan oleh mereka sendiri namun pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang hampir setiap minggu terutamanya pada hari Sabtu dan Minggu karena diketahui pada hari itu lokasi wisata baik Villa Bambapuang dan Permandian Alam Lewaja ramai akan wisatawan.

Dari hasil wawancara tersebut dengan beberapa informan yang ada dapat diketahui bahwa pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang sudah cukup baik. Pengawasan intern yang dilakukan oleh pihak kantor dilakukan minimal 2 kali seminggu yakni pada hari Sabtu dan Minggu karena pada hari itu diketahui pengunjung yang datang ke lokasi wisata yang dikelola oleh pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang baik Villa Bambapuang maupun Permandian Alam Lewaja cukup ramai dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Pengawasan yang dilakukan yakni pengawasan secara langsung dengan turun langsung ke lokasi wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak kantor dengan mengawasi setiap koordinator lapangan terhadap karcis pemungutan retribusi pariwisata dan pemantauan yang dilakukan petugas sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan dilokasi wisata sesuai dengan ketentuan.

5. Faktor Pendukung

Dalam melaksanakan pengelolaan retribusi sektor pariwisata terdapat faktor pendukung yang sifatnya menunjang suatu kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Penulis melakukan wawancara dengan SN selaku Kasi Sarana dan Prasarana dan Jasa Pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang dengan pertanyaan mengenai apa saja faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Hal yang dikemukakan informan adalah:

“jadi yang kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan retribusi itu dengan cara kita senantiasa dan sebisa mungkin tetap menjaga kebersihan lokasi wisata agar pengunjung juga nyaman, karena kalau lokasi wisata baik itu pada villa bambapuang atau permandian alam lewaja kebersihannya tidak terjaga pasti pengunjung merasa tidak nyaman dan mungkin saja pengunjung tidak mau lagi datang ke lokasi wisata karena untuk foto saja pasti pengunjung sudah malas kalau lokasi wisatanya tercemar kebersihannya, selain menjaga kebersihan lokasi wisata kita juga sebisa mungkin mempercantik objek wisata tujuannya seperti yang saya bilang tadi agar pengunjung lebih banyak spot untuk fotonya dan semakin bagus objek wisata besar kemungkinan pengunjung akan mengunggah fotonya ke media sosial sehingga di lihat oleh banyak orang dan mungkin saja orang lain akan menjadi tertarik untuk datang ke lokasi tersebut. (wawancara 24 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan pendapatan yaitu pihak kanto Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang sebisa mungkin menjaga kebersihan lokasi wisata agar tetap terjaga kebersihannya dan wisatawan menjadi nyaman selain itu mempercanti

lokasi wisata juga menjadi cara pihak Dispopar untuk menarik minat pengunjung datang ke lokasi wisata.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh salah satu informan yang peneliti juga wawancara dengan FT selaku Kasubag Perencanaan yang mengatakan bahwa:

“seperti yang kita tahu juga sekarang itu rata-rata sekarang orang sangat suka foto-foto lalu mengunggahnya ke media sosial yang mereka punya baik itu pada facebook ataupun instagram, dari situ kita memikirkan bagaimana caranya agar orang-orang yang datang ke lokasi wisata bisa mendapatkan hasil foto yang bagus caranya itu dengan kita membuat variasi-variasi spot foto kita juga buat beberapa spot foto untuk wisatawan agar wisatawan yang mau berfoto tidak bertumpuk atau antri terlalu lama di satu spot foto kita buat beberapa jadi pengunjung bisa saling berganti tempat spot foto (wawancara 23 September 2020)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa selain menjaga kebersihan lokasi wisata cara yang dilakukan pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang menarik wisatawan yaitu membuat spot-spot foto baru pada lokasi wisata baik itu di villa bambapuang maupun pada permandian alam lewaja.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai faktor yang mendukung pengembangan wisata alam lewaja dengan informan RF yang merupakan pengunjung yang menyatakan bahwa :

“ menurut saya faktor yang mendukung itu karena di permandian alam lewaja ini selain memiliki kolam untuk berenang juga memiliki air terjun sebagai daya tarik tersendiri selain itu lokasi wisata yang lumayan jauh dari kota sehingga membuat suasana di sini jadi cukup tenang dari suara-suara kendaraan dan juga dari polusi jadi wisatawan yang datang disini bisa liburan dengan cukup tenang (wawancara 18 Januari 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa salah satu yang menjadi daya tarik dari lokasi wisata permandian alam lewaja yaitu pada air terjunnya. Lokasi yang cukup jauh dari kota juga menjadi salah satu faktor yang mendukung dari pengembangan wisata ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai faktor yang mendukung pengembangan wisata villa bambapuang dengan informan NR yang merupakan pengunjung yang menyatakan bahwa :

“menurutku kelebihan villa bambapuang itu karena letaknya yang cukup mudah dijangkau karena berada di jalan poros Enrekang-Toraja letaknya juga cukup baik karena tepat berada didepan icon Enrekang yaitu Gunung Nona serta udaranya yang sejuk karena tidak terlalu dekat dengan jalan sehingga pencemaran udara juga tidak terlalu banyak dan juga memiliki beberapa spot foto yang menarik bagi para wisatawan. Disini juga terdapat penginapan jadi wisatawan yang datang dari luar kota bisa bermalam di sini sambil menikmati pemandangan Gunung Nona (wawancara 18 Januari 2021)”.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa faktor yang mendukung pengembangan wisata villa bambapuang yaitu letak lokasinya yang berada di jalan poros Enrekang-Toraja sehingga wisatawan yang dari luar kota tidak sulit menemukan lokasi wisata ini. Selain itu pada lokasi wisata ini juga memiliki fasilitas penginapan sehingga pengunjung yang datang dari jauh juga bisa bermalam di lokasi wisata ini.

6. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan pengelolaan retribusi sektor pariwisata yang baik tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan, akan tetapi terdapat juga faktor penghambat yang dapat menghambat jalannya suatu kegiatan.

Peneliti melakukan wawancara mengenai faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang dengan informan SN yang menyatakan bahwa:

“kalau faktor penghambatnya itu untuk sekarang salah satunya karena adanya ini pandemi Covid-19 yang menghambat banyak kegiatan termasuk juga pendapatan retribusi pada pariwisata ini sangat berkurang, pada awal adanya pandemi ini kita menutup tempat wisata hingga beberapa minggu dan setelah di buka kembali pengunjung yang datang tidak begitu ramai bahkan sangat kurang tidak seperti waktu sebelum ada Covid-19 ini. (wawancara 24 September 2020)”

Dari hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa salah satu faktor penghambat tidak tercapainya target retribusi yaitu saat ini adanya pandemi Covid-19. Larangan untuk membuka tempat wisata dalam beberapa waktu dan juga beberapa masyarakat sungkan untuk keluar rumah karena adanya covid-19 ini selain itu juga adanya peraturan dari pemerintah untuk tetap jaga jarak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan FT selaku Kasubag Perencanaan yang menyatakan bahwa:

“kita tau juga sekarang sudah banyak sekali tempat wisata baru di kampung kita ini yang dibuka oleh pihak swasta seperti agro wisata mendatte park yang saat ini sedang banyak di datangi oleh pengunjung, mungkin itu salah satu faktor penghambat target retribusi tidak tercapai. (wawancara 23 September 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka diketahui bahwa salah satu faktor penghambat selain adanya pandemi covid-19 ini adalah karena adanya persaingan dengan wisata-wisata lain yang dibuka oleh pihak swasta.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai faktor yang menghambat pengembangan wisata alam lewaja dengan informan RF yang merupakan pengunjung yang menyatakan bahwa :

“kalau dari faktor penghambatnya mungkin akses ke air terjunnya yang cukup jauh dari kolam renang jadi wisatawan yang datang mungkin akan berfikir dua kalau mau ke air terjunnya, kita tau juga kalau sampai di lokasi pengunjung biasa kehausan tapi didalam lokasi tidak ada satupun penjual apalagi ke air terjun cuman bisa di akses dengan jalan kaki mungkin kalau bisa pengelola dari lewaja menyiapkan kendaraan untuk ke air terjunnya karna kalau di lihat dari kondisi jalanan juga cukup baik mi di lalui kendaraan roda dua. Yang kurang juga dari permandian alam lewaja ini beberapa fasilitasnya sudah tidak berfungsi dengan baik tapi di biarkan begitu saja contohnya seluncurannya yang sudah tidak licin lagi, tempat bilasnya yang kadang berfungsi dan juga kadang tidak berfungsi, serta WC nya yang menurut saya sangat kurang perawatan (wawancara 18 Januari 2021)”.

Dari hasil wawancara dengan informan maka diketahui bahwa faktor penghambat dari pengembangan wisata lewaja yaitu jalan menuju lokasi air terjun yang cukup jauh dan hanya bisa diakses dengan jalan kaki serta beberapa fasilitas yang ada di permandian alam lewaja sudah tidak berfungsi dengan baik bahkan fasilitas seperti WC yang sangat penting bagi pengunjung kurang diperhatikan oleh pihak pengelola permandian alam lewaja.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai faktor yang menghambat pengembangan wisata villa bambapuang dengan informan NR yang merupakan pengunjung yang menyatakan bahwa :

“yang kurang dari villa bambapuang ini menurut saya ketersediaan makanan ringan yang sangat kurang karena di sini juga yang jualan sangat sedikit jadi pengunjung yang mau beli sesuatu itu sangat terbatas dan juga kebersihan di sini klau bisa lebih di perhatikan karena kan lokasi villa bambapuang ini yang berada di jalan poros

Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner (2003) bahwa pengorganisasian yakni mengorganisasikan orang-orang dan sumberdaya lainnya untuk melaksanakan rencana. Secara khusus, pengorganisasian mencakup penentuan bagaimana cara mengelompokkan berbagai aktivitas dan sumberdaya manusia. Dengan ini penulis dapat mengetahui bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam teori ini sudah dilakukan dengan maksimal.

3. Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang yaitu bagaimana seorang pemimpin dalam mengarahkan, mengontrol para bawahan agar lebih bertanggung jawab dan semua pekerjaan terkoordinasi demi mencapai tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan terkait pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang sudah dapat dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang. hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner (2003) bahwa kepemimpinan sebagai aktivitas yang penting. Kepemimpinan adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja bersama demi kepentingan organisasi tersebut.

Kemudian untuk mengetahui bawahan telah menjalankan tugasnya dengan baik maka pemimpin pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang senantiasa mengadakan pertemuan rutin dengan bawahan setiap bulan serta meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya.

4. Pengendalian

Fungsi pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Pengendalian pada pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang yakni terkait siapa yang menjadi objek untuk diawasi dalam pengelolaan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi pengendalian yang menjadi objek untuk diawasi yaitu petugas loket pada lokasi wisata.

Sejalan dengan wawancara lapangan yang dilakukan peneliti dapat dikatakan sudah maksimal. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner (2003) ketika organisasi bergerak menuju tujuannya manajer harus memonitori kemajuan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut berkinerja sedemikian rupa sehingga akan mencapai tujuannya pada waktu yang telah ditentukan.

Kemudian dalam mengawasi pemimpin pada kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan langsung terhadap bawahannya.

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung sesuatu yang mendukung pengelolaan retribusi sektor pariwisata sehingga pendapatan dalam sektor retribusi pariwisata meningkat sedangkan faktor penghambat sesuatu yang menghambat sehingga pendapatan menjadi menurun bahkan berjalan tidak lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang yakni adanya sumber daya yang mendukung sehingga pendapatan dalam sektor retribusi dapat meningkat. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor pariwisata yakni adanya persaingan yang cukup ketat dengan pihak swasta sehingga dapat mengurangi pendapatan retribusi pariwisata. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pariwisata di Kabupaten Enrekang masih perlu di tangani dengan baik sesuai dengan yang dikemukakan oleh Susilo dan Halim (2002) belum optimalnya retribusi daerah dimana ada tiga faktor :

- a) Penerimaan target belum terealisasi,
- b) Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan,
- c) Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusi atau petugas pelaksana di lapangan serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan untuk mengetahui pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan terhadap pengelolaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang sudah dapat dikatakan sesuai dengan sistematika fungsi manajemen manajemen mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Pengorganisasian pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Enrekang yang sudah cukup baik mulai dari pembagian tugas sesuai dengan bidangnya serta pengelompokkan sesuai keahliannya.
3. Kepemimpinan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan atau menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah cukup baik dalam pengelolaan retribusi agar lebih maksimal.
4. Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang juga sudah menunjukkan hasil yang baik dengan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Pelaksanaan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang sudah cukup maksimal karena dari pihak pengelola sudah turun langsung kelapangan dalam meminta pungutan retribusi.

B. Saran

1. Diperlukan pengawasan yang lebih baik lagi terkait pengeloaan retribusi pariwisata di Kabupaten Enrekang karena di Kabupaten Enrekang sangat potensial untuk pengembangan wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu intensif melakukan pengawasan terhadap alur penerimaan anggaran retribusi obyek wisata agar penerimaan retribusi dapat masuk dalam anggaran pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Pihak pengelola retribusi hendaknya melengkapi sarana dan prasarana untuk menambah kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Pihak pengelola perlu menambah fasilitas tempat pembuangan sampah, serta tata tertib kebersihan agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arsyad, Azhar. 2002. *Pokok – Pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baba, Ali. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Usman. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. 2006. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Setiadi, Nugroho J. 2003. *Konsep Dan Implementasi dan Untuk Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Perdana Media.
- Siagian, Sondang P. 2015. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soebachi, Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soegianto. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Jakarta Lembaga Administrasi.
- Stoner, James A. F. 2003. *Manajemen Edisi Bahasa Indonesia Jilid II*. Jakarta: Gramedia Group.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Suvena, I Ketut dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali: Pustaka Larasan.

Sumber Jurnal, Skripsi

Hidayat, Nor, A'raf Musthafa Rusnain. 2016. *Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Katingan*. Jurnal Pencerah Publik. Vol 3(1). 12-16.

Nursafitra, Muh. Nursadik dan Muhammad Nursafitra, Muh. Nursadik dan Muhammad Yunus. 2019. *Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol 5(1). 37-48.

Mustafa L., Elwan. 2018. *Implementasi Pengelolaan Pajak Retribusi Parkir Di Kota Kendari*. Jurnal Publicuho. Vol 1(4). 18-31.

Sumber Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



XZY MEY YUNI, lahir di Pakewa, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Enrekang, pada tanggal 06 Juni 1998. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Agus Sardado dan Rismawaty.

Penulis menempuh pendidikan di TK Aisyah Enrekang pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 116 Enrekang tahun 2010. Pada tahun 2013 menyelesaikan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 2 Enrekang dan tamat di SMK PGRI Enrekang pada tahun 2016 dengan jurusan Administrasi Perkantoran kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sampai tahun 2021 dengan gelar sarjana (S.Sos).

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis giat dalam mengikuti perkuliahan di kampus dan mengikuti seminar yang diadakan oleh kampus. Untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan menulis skripsi dengan judul **“Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Enrekang”**